

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan adalah perjanjian paling kuat dan mulia di sisi Allah karena merupakan akad yang berhubungan dengan manusia dan menyangkut sesuatu yang sebelumnya diharamkan menjadi halal.¹ Melalui pernikahan, wanita menjadi halal bagi laki-laki yang menikahnya dan mendapatkan keturunan yang shaleh dari keduanya. Allah Swt. berfirman dalam al-Qur'an Surat An Nahl Ayat 72 :²

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَيْنَ وَحَفْدَةٍ
وَرَزَقَكُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

Hakikatnya, baik laki-laki maupun perempuan menginginkan kebahagiaan dalam pernikahan. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa dalam setiap pernikahan pasti akan ada masalah yang dapat terjadi setiap saat atau dapat terjadi tanpa diperhitungkan sebelumnya, hingga tak jarang menyebabkan terjadinya perceraian. Perceraian adalah putusnya ikatan pernikahan dalam kehidupan rumah tangga karena dinamika rumah tangga

¹Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi, *Suami Istri Berkarakter Surgawi*, terj. Ibnu Barnawa (Jakarta: Al-Kautsar, 2007), 201.

²“Q.S. An-Nahl [16]: 72”, diambil dari *Quran In Word Ver 1.2.0: Versi Arabic*, Program yang Diproduksi oleh Mohamad Taufiq, 2005.

sifatnya tidak kekal.³ Adapun masalah atau faktor yang sering mempengaruhi terjadinya perceraian yaitu adanya kekerasan dalam rumah tangga terhadap istri, suami tidak memenuhi kewajibannya memberi nafkah lahir dan batin dalam waktu tertentu dan tidak memperoleh keturunan karena cacat biologis mengidap penyakit yang tidak dapat dihindari lagi.⁴

Ada dua bentuk pengajuan perceraian di Pengadilan Agama sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 114, bahwa perceraian dapat terjadi karena talak ataupun gugatan perceraian. Jika suami yang mengajukan perceraian maka dinamakan cerai talak dan istri berhak mendapatkan nafkah iddah karena yang dijatuhkan adalah talak raj'i. Sebaliknya, cerai gugat adalah perceraian yang diajukan oleh istri dan dijatuhkan talak ba'in.⁵ Adapun mengenai nafkah iddah cerai gugat, hakim dalam memutuskan perkara tergantung pada pertimbangan hukum yang digunakan.

Ada hakim yang menggunakan Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 (b) sebagai dasar memutuskan perkara, bahwa nafkah iddah diberikan kecuali mantan istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil. Sebagai contoh, hakim di Pengadilan Agama Jakarta Barat perkara nomor 396/Pdt.G/2012/PA.JB dalam amar putusannya tentang gugatan nafkah iddah istri yang dijatuhi talak ba'in ditolak, sebab istri dianggap

³ Fanani dan Badria Nur Lailina Ulfa, "Penerapan Masalih Mursalah dalam Hak Ex Officio Hakim", *Jurnal Tsaqafah*, Vol. 13 No. 2 (November, 2017), 340.

⁴ Nasir, A. Muh. Arfah Pattenreng dan Baso Madiong, "Perceraian Dan Akibat Hukumnya Pada Masyarakat Kota Makassar", *Indonesian Journal Of Legality Of Law*, Vol. 4 No. 1 (March, 2018), 18.

⁵ Muchammad Hammad, "Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian: Nafkah Iddah Talak dalam Hukum Keluarga Muslim Indonesia, Malaysia, dan Yordania", *Al-Aḥwāl*, Vol. 7 No. 1 (2014), 27.

nusyuz karena bersikeras untuk mengajukan gugatan perceraian dan suaminya tetap ingin mempertahankan rumah tangganya.

Padahal diketahui alasan yang menjadi dasar diajukannya gugatan perceraian oleh istri adalah karena suami sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga seperti memukul, berkata kasar, dan sebagainya. Akibat dari amar putusan ini, istri tidak mendapatkan hak perdatanya sebagaimana dalam perceraian karena cerai talak meskipun alasan dasar pengajuan gugatan bukan karena nusyuz.

Selain dasar pertimbangan hukum di atas, ada juga hakim yang menggunakan Putusan Mahkamah Agung nomor 137/K/AG/2007 sebagai dasar pertimbangan hukum untuk memutus perkara cerai gugat, bahwa istri yang menggugat cerai suaminya tidak selalu dihukumkan nusyuz dan mendapat nafkah iddah. Sebagaimana yang diputuskan oleh hakim di Pengadilan Agama Jakarta Selatan perkara nomor 1394/Pdt.G/2012/PA.JS. Alasan dasar diajukannya cerai gugat karena antara istri dan suami sering terjadi pertengkaran yang terus menerus dan suami telah melakukan perselingkuhan dengan perempuan lain. Oleh karena itu, istri mendapatkan keadilan dengan dikabulkannya gugatan karena tidak dihukumkan nusyuz oleh hakim dan adanya kesanggupan suami memberikan nafkah iddah.

Di samping itu, baik Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 (b) atau Putusan Mahkamah Agung nomor 137/K/AG/2007 yang digunakan oleh hakim sebagai pertimbangan hukum dalam memutuskan suatu perkara, keduanya masing-masing mempunyai kekuatan hukum dan dasar hukum

dalam penentuan nafkah iddah cerai gugat. Berdasarkan hal tersebut, penulis melakukan analisa *maqāṣid syarī'ah*, yakni memelihara mashlahah jiwa (*hifẓ an-nafs*) dan memelihara harta (*hifẓ al-māl*) pemikiran Jasser Auda.

Yang dimaksud memelihara mashlahah jiwa yaitu terpenuhinya nafkah iddah istri tanpa dibedakan apakah talak raj'i atau ba'in, sehingga terjamin kehidupannya selama masa iddah.⁶ Sedangkan memelihara harta dalam hal ini ialah menjaga agar kehidupan istri selama masa iddah dapat terjamin kesejahteraannya.⁷ Adapun Jasser Auda adalah seorang Associate Professor di Qatar Fakultas Studi Islam (QFSI) yang sumber pemikirannya yaitu al-Qur'an, Sunnah, Kemaslahatan Islam Tertinggi, Hukum-hukum dari mazhab fikih tradisional, Argumen-argumen rasional dan nilai-nilai modern.⁸

Analisa *maqāṣid syarī'ah* dilakukan untuk mendapat suatu kesimpulan tentang pertimbangan hukum yang lebih tepat digunakan oleh hakim dalam mengadili perkara nafkah iddah dalam cerai gugat. Dari latar belakang tersebut, penulis merasa ini adalah hal menarik yang dapat diangkat menjadi skripsi dengan judul: "Nafkah Iddah Cerai Gugat dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 (b) dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 137/K/Ag/2007 : Analisa *maqāṣid syarī'ah*"

⁶ Muhammad Fauzan, "*Maqāṣhid* Nafkah Iddah dan Perlindungan Perempuan", *Jurnal Hukum Islam*, Vol. XVI No. 1 (Juni, 2016), 80.

⁷ Ahmad Al-Mursi Husai Jauhar, *Maqashid Syariah*, terj. Khikmawati (Jakarta: Amzah, 2010), 171.

⁸ M. Amin Abdullah, "Bangunan Baru Epistemologi Keilmuan Studi Hukum Islam Dalam Merespon Globalisasi", *Asy-Syir'ah*, Vol. 46 No. II (Juli-Desember, 2012), 328.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka didapatkan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana perbandingan Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 (b) dan Putusan Mahkamah Agung nomor 137/K/AG/2007 dalam penentuan nafkah iddah cerai gugat?
2. Bagaimana analisa *maqāṣid syarī'ah* tentang nafkah iddah pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 (b) dan Putusan Mahkamah Agung nomor 137/K/AG/2007 ?

C. Tujuan dan Kontribusi

Berdasarkan klasifikasi rumusan masalah di atas serta agar penelitian ini menjadi lebih jelas, maka penulis menetapkan tujuan penelitian sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dan memahami letak perbedaan Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 (b) dan Putusan Mahkamah Agung nomor 137/K/AG/2007 dalam penentuan nafkah iddah cerai gugat.
- b. Untuk mengetahui dan memahami analisa *maqāṣid syarī'ah* tentang nafkah iddah pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 (b) dan Putusan Mahkamah Agung nomor 137/K/AG/2007.

Selain tujuan di atas, diharapkan penelitian ini memiliki kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum di masyarakat. Adapun kontribusi yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

- a. Kegunaan Ilmiah, yaitu untuk menambah pengetahuan para pelaku akademik dibidang hukum Islam, khususnya tentang nafkah iddah dalam cerai gugat. Baik sebagai data perbandingan atau informasi dalam mengembangkan rangkaian penelitian lebih lanjut dalam karya ilmiah yang lebih mendalam.
- b. Kegunaan Praktis, yaitu untuk memberikan pertimbangan hukum yang lebih tepat digunakan oleh Hakim di Pengadilan Agama dalam mengadili perkara nafkah iddah dalam cerai gugat.

D. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dimaksudkan agar tidak terjadi pengulangan penelitian sebelumnya, namun dapat dijadikan bahan rujukan dan penguat dari penelitian yang akan diteliti.

M. Ulil Azmi, (2015) dengan judul Pemberian Nafkah Iddah Dalam Cerai Gugat (Analisis Putusan Perkara No. 1445/Pdt.G/2010/PA.JS). Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pandangan hukum Islam dan hukum positif tentang hak nafkah iddah bagi Istri dalam cerai gugat dan analisis pertimbangan dan putusan hakim yang memerintahkan tergugat untuk memberikan nafkah iddah kepada penggugat berdasarkan putusan perkara nomor 1445/Pdt.G/2010/PA.JS. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif. Sedangkan jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Sumber data primer adalah dokumen putusan perkara nomor 1445/Pdt.G/2010/PA.JS dan wawancara dengan hakim

Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Sedangkan data sekundernya adalah peraturan perundang-undangan tentang perkawinan. Adapun hasil dari penelitian, menunjukkan bahwa dalam hukum Islam nafkah iddah dan mut'ah dalam talak ba'in didasarkan pada pendapat imam Hanafi, bahwa istri berhak mendapat nafkah dan tempat tinggal, kecuali jika istri tersebut ber-iddah karena perpisahan disebabkan sikap nusyuz istri. Sedangkan dalam hukum positif, pemberian nafkah iddah dan mut'ah didasarkan pada pasal 41 huruf (c) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 149 KHI yang menyatakan bahwa Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri. Dan dalam putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan nomor 1445/Pdt.G/2010/PA.JS pemberian nafkah iddah oleh majelis hakim didasarkan dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 137/K/AG/2007 tanggal 19 September 2007.

Zian Mufti, (2016) dengan judul Hak Nafkah Iddah Pasca Cerai Gugat Dihubungkan Dengan Azaz Kepastian Hukum (Analisis Perbandingan putusan Perkara No. 1394/Pdt.G/2012/PA.JS dan Perkara No. 396/Pdt.G/2012/PA.JB Tujuan penelitian untuk mengetahui hak nafkah iddah pasca cerai gugat dalam fiqih dan Kompilasi Hukum Islam, mengetahui dasar dan pertimbangan majelis hakim dari dua putusan, yaitu perkara nomor 1394/Pdt.G/2012/PA.JS dan Perkara nomor 396/Pdt.G/2012/PA.JB, serta ingin mengetahui penyebab perbedaan dari dua putusan tersebut. Perkara nomor 1394/Pdt.G/2012/PA.JS mengabulkan nafkah iddah bagi bekas istri

dengan pertimbangan adanya kesanggupan dari bekas suami. Sedangkan perkara nomor 396/Pdt.G/2012/PA.JB tidak mengabulkan nafkah iddah bagi bekasistri karena didasarkan pada ketentuan Kompilasi Hukum Islam pasal 149 huruf (b), yang pada pokoknya bahwa istri yang dijatuhi talak ba'in tidak mendapat nafkah iddah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Sumber data primer berupa wawancara hakim di Pengadilan Agama Jakarta Selatan dan hakim Pengadilan agama Jakarta Barat. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa fikih Islam tentang nafkah iddah pasca cerai gugat para fuqaha berbeda pendapat dan dalam Kompilasi Hukum Islam disesuaikan dengan ketentuan dalam pasal 149 huruf (b). Majelis hakim kedua Pengadilan Agama dalam pertimbangan hukumnya sama-sama berdasarkan landasan yuridis dan perbedaannya terletak pada adanya kesanggupan bekas suami dalam memberikan nafkah iddah dalam perkara nomor 1394/Pdt.G/2012/PA.JS.

Dari penelitian terdahulu di atas jelas ada perbedaan dengan penelitian yang penulis teliti. Fokus penelitian yang penulis lakukan lebih kepada mengetahui Nafkah Iddah Cerai Gugat dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 (b) dan Putusan Mahkamah Agung nomor 137/K/AG/2007 yang kemudian dikaji menggunakan *maqāṣid syarī'ah*, yakni menjaga jiwa (*hifz an-nafs*) dan memelihara harta (*hifz al-māl*) pemikiran Jasser Auda.

E. Metode Penelitian

1. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*) karena yang diteliti adalah berbagai aturan hukum.⁹ Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi.¹⁰ Untuk memperkaya pertimbangan hukum dan mendapatkan hasil penelitian yang lebih baik, maka pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*) digabung dengan pendekatan Kasus (*Case Approach*), karena penelitian pada berbagai aturan hukum dapat menggunakan dua pendekatan yang sesuai dengan penelitian.¹¹ Pendekatan Kasus (*Case Approach*) mempunyai tujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma hukum dalam praktik hukum atau terhadap kasus-kasus yang telah mendapat putusan.¹² Dalam hal ini, peneliti melakukan penjelasan tentang nafkah iddah cerai gugat dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 (b) dan Putusan Mahkamah Agung nomor 137/K/AG/2007. Digunakannya kedua dasar hukum tersebut karena hakim di Pengadilan Agama sering menggunakan kedua dasar hukum ini sebagai pertimbangan hukum dalam memberi putusan terhadap perkara nafkah iddah cerai gugat.

⁹ Johni Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2007), 302.

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 24.

¹¹ Johni Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, 301.

¹² *Ibid.*, 321.

Selanjutnya, kedua dasar hukum tersebut dianalisa menggunakan *maqāṣid syarī'ah*, yakni memelihara mashlahah jiwa (*hifzh an-nafs*) dan memelihara harta (*hifẓ al-māl*) pemikiran Jasser Auda.¹³ Dipilihnya pemikiran Jasser Auda karena merupakan intelektual muslim kontemporer yang berwawasan luas, memiliki pengetahuan mendalam tentang Islam dan memahami realitas kekinian umat Islam dengan baik. Selain itu, Jasser Auda juga memiliki kontribusi besar dalam pembaharuan metodologi hukum Islam.¹⁴

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang ditujukan pada peraturan-perturan tertulis dan pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepkan sebagai norma yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang.¹⁵ Dilakukan dengan cara menemukan literatur tentang nafkah iddah cerai gugat untuk melakukan analisa terhadap Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 (b) dan Putusan Mahkamah Agung nomor 137/K/AG/2007 menggunakan *maqāṣid syarī'ah*, yakni memelihara mashlahah jiwa (*hifzh an-nafs*) dan memelihara harta (*hifẓ al-māl*) pemikiran Jasser Auda.

¹³ Muhammad Fauzan, "Maqāshid Nafkah Iddah Dan Perlindungan Perempuan," *Hukum Islam*, Vol. XVI No. 1 (Juni, 2016), 80.

¹⁴ Muhammad Salahuddin, "Menuju Hukum Islam yang Inklusif-Humanistik: Analisis Pemikiran Jasser Auda tentang Maqāṣid al-Sharī'ah," *Ulumuna*, Vol. 16 No. 1 (Juni, 2012), 107.

¹⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), 52.

3. Sumber Data

Ada dua sumber data yang akan dijadikan sumber rujukan atau landasan utama dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Sumber Data Primer, adalah bahan-bahan hukum yang sifatnya mengikat dan merupakan norma-norma dasar utama dalam setiap pembahasan masalah. Dalam penelitian ini, sumber data primer yang digunakan antara lain: Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 (b), Putusan Mahkamah Agung nomor 137/K/AG/2007, Ayat dan Hadits mengenai nafkah iddah cerai gugat.
- b. Sumber Data Sekunder, adalah diskripsi dari teori yang dihasilkan oleh sumber primer. Dalam hal ini penulis merujuk pada bahan-bahan yang dapat memberikan penjelasan-penjelasan dan penafsiran-penafsiran yang mendukung sumber data primer dalam memperoleh pengertian dan pemahaman yang utuh, diantaranya yaitu: buku-buku, hasil penelitian, artikel, jurnal ilmiah, opini maupun berita yang berkaitan dengan nafkah iddah.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian yaitu menggunakan studi kepustakaan dengan mengumpulkan data tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 (b) dan Putusan Mahkamah Agung nomor 137/K/AG/2007 terkait ketentuan dalam menentukan nafkah iddah cerai gugat. Adapun alat pengumpulan data menggunakan studi dokumentasi dengan cara menelusuri buku-buku serta literatur yang berkaitan dengan

nafkah iddah cerai gugat dan wawancara yang dilakukan secara lisan dengan salah satu hakim di Pengadilan Agama Kepanjen Kabupaten Malang untuk melengkapi pembahasan dari penelitian ini.

5. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis melakukan analisis data menggunakan teknik kualitatif karena merupakan suatu analisis yang dilakukan dengan memahami dan merangkai data yang telah diperoleh dan disusun sistematis, kemudian ditarik kesimpulan yang bertujuan untuk mengerti atau memahami gejala yang akan diteliti.¹⁶ Dalam hal ini, setelah mendapatkan dan mengumpulkan data Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 (b) dan Putusan Mahkamah Agung nomor 137/K/AG/2007 tentang penentuan nafkah iddah cerai gugat, penulis kemudian melakukan perbandingan terhadap Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 (b) dan Putusan Mahkamah Agung nomor 137/K/AG/2007 tentang nafkah iddah cerai gugat. Selanjutnya, dilakukan analisa menggunakan *maqāṣid syarī'ah* yang seluruh tujuannya diarahkan untuk kepentingan umat manusia,¹⁷ yakni memelihara mashlahah jiwa (*hifẓ an-nafs*) dan memelihara harta (*hifẓ al-māl*) pemikiran Jasser Auda untuk mengambil sebuah kesimpulan.

¹⁶ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologi ke Arah Ragam Varian Kontemporer* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007), 203.

¹⁷ Muhammad Faisol, "Pendekatan Sistem Jasser Auda Terhadap Hukum Islam: ke Arah Fiqh Post-Postmodernisme," *Kalam*, Vol. 6 No. 1 (Juni, 2012), 44.

F. Sistematika Pembahasan

Agar penyusunan penelitian lebih terarah dan saling berhubungan antara bab satu dengan bab yang lain, maka peneliti menyusun sistematika pembahasan yang terdiri dari empat bab, yaitu:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini berisikan latar belakang sebagai penjelasan tentang timbulnya keinginan peneliti membahas masalah yang dibahas. Selanjutnya dari latar belakang dijadikan beberapa pertanyaan yang kemudian disusun sebagai rumusan masalah. Setelah itu peneliti mencantumkan tujuan dan kontribusi sebagai suatu harapan yang akan dicapai melalui hasil penelitian. Kemudian dicantumkan juga penelitian terdahulu untuk menunjukkan bahwa masalah yang dibahas belum pernah diteliti sebelumnya. Selanjutnya mencantumkan metode penelitian dan sistematika pembahasan agar penelitian menjadi terarah dan sistematis.

BAB II: KAJIAN PUSTAKA

Bab ini memuat kajian pustaka yang ada kaitannya dengan cerai gugat dan nafkah iddah baik dari peraturan perundang-undangan perkawinan di Indonesia maupun dalam aturan hukum Islam dan fikih tradisional serta *maqāṣid syarī'ah* pemikiran Jasser Auda, khususnya tentang memelihara mashlahah jiwa (*hifẓ an-nafs*) dan memelihara harta (*hifẓ al-māl*). Di dalamnya mencakup pengertian, dasar hukum dan akibat hukumnya.

BAB III:HASIL PENELITIAN DAN ANALISA

Bab ini memuat pembahasan dan analisa dari hasil penelitian, mencakup letak perbedaan Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 (b) dan Putusan Mahkamah Agung nomor 137/K/AG/2007 dalam penentuan nafkah iddah cerai gugat serta analisa *maqāṣid syarī'ah* tentang nafkah iddah pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 (b) dan Putusan Mahkamah Agung nomor 137/K/AG/2007.

BAB IV: PENUTUP

Berisi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang dilakukan tentang nafkah iddah cerai gugat dalam Kompilasi Hukum Islam dan Putusan Mahkamah Agung nomor 137/K/AG/2007 analisa *maqāṣid syarī'ah*, yakni memelihara mashlahah jiwa (*hifẓ an-nafs*) dan memelihara harta (*hifẓ al-māl*) pemikiran Jasser Auda.